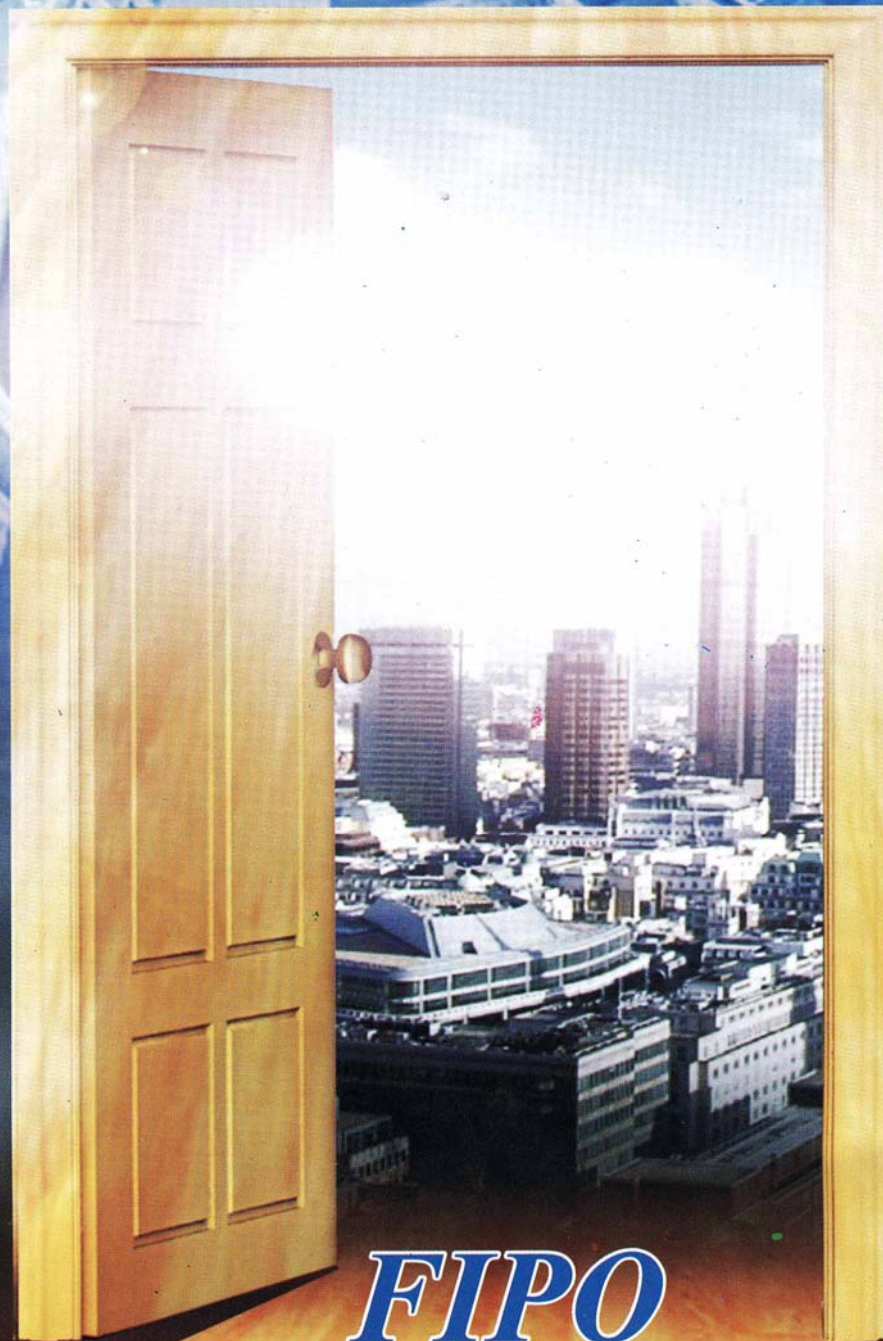


MENDORONG KEMAJUAN DENGAN KOMPETISI



FIPO

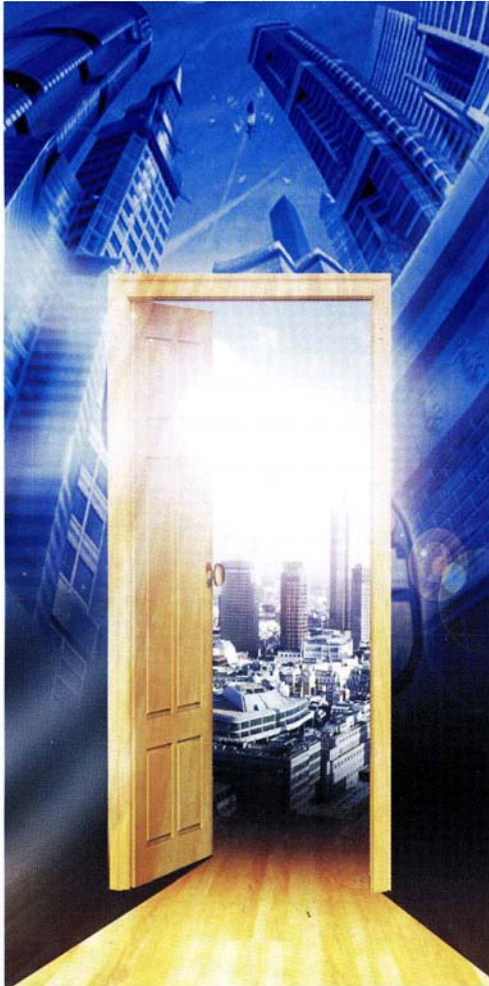
The Fajar Institute of Pro-Otonomi (FIPO)

Graha Pena Lt.4 Jl. Urip Sumoharjo No.20 Makassar

Telp.(0411) 3661923, Fax.(0411) 3661928



MEMBUKA GERBANG KREATIVITAS DAERAH



Konsep *best practice* merebak dalam praktik pemerintahan daerah di Indonesia seiring pelaksanaan otonomi daerah yang dimulai secara resmi tahun 1999 dengan diberlakukannya Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Konsep ini mendorong pemerintah daerah melakukan upaya kreatif dalam menjalankan pemerintahan daerah. Upaya kreatif tersebut merupakan proses mengolah ide dan metode pelaksanaan pemerintahan daerah yang nantinya diharapkan menghasilkan praktik dan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik. Kreativitas inilah yang kemudian dikenal dan disosialisasikan dengan istilah *best practice* (Eko Susi Rosdianasari : 2007).

Program-program yang dirancang dan dijalankan pemerintah daerah sebagai upaya membangun tata kelola pemerintahan yang baik tidak selamanya akan mendapatkan apresiasi sebagai program *best practice*. Bila suatu program mengalami stagnasi atau jalan di tempat maka program itu dianggap tidak lagi memenuhi kriteria *best practice*. Program tersebut hanya program biasa yang tidak memiliki keunggulan.

Upaya mendorong pemerintah daerah mewujudkan program *best practice* merupakan bagian dari misi the Fajar Institute of Pro Otonomi (FIPO). Penelitian yang dilakukan FIPO dalam kurun waktu dua tahun (2008/2009–2009/2010) menunjukkan, terdapat sejumlah program yang semula merupakan program *best practice* harus “melepaskan label” *best practice*-nya karena dalam pandangan FIPO tidak terdapat upaya kreatif untuk mengembangkan program tersebut menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Namun demikian, dari sekian program lainnya yang dimonitor dan dievaluasi FIPO selama dua tahun terakhir, masih terdapat beberapa program yang karena upaya kreatif pemerintah daerahnya sehingga program tersebut mengalami developmentasi.

MENENGGOK INOVASI DAERAH SEPANJANG TAHUN 2009

Monitoring dan evaluasi program pemerintah daerah yang dilakukan FIPO untuk penilaian Otonomi Award 2009 tidak saja untuk program yang baru dicanangkan pada 2009 tetapi untuk seluruh program kerja tahun-tahun sebelumnya yang masih berjalan pada 2009. Program yang dinilai, berdasarkan ketentuan FIPO, adalah program yang telah berjalan minimal satu tahun kegiatan dan merupakan program yang berkelanjutan.

Pada tahun kedua penelitian FIPO terlihat adanya peningkatan temuan program inovatif dibandingkan tahun sebelumnya. Jika pada 2008 FIPO menemukan 164 program maka pada 2009 terdapat 199 temuan program. Ke-199 temuan program tersebut didapatkan melalui penelitian dalam kurun waktu empat bulan, terhitung dari November 2009 hingga Maret 2010.

Sama halnya pada tahun 2008, temuan program tahun 2009 juga tersebar pada sembilan indikator yakni pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, perizinan dan administrasi kependudukan, partisipasi publik dan kesinambungan politik, akuntabilitas publik, dan lingkungan hidup. Sebagian temuan program telah memiliki perangkat hukum berupa peraturan daerah (perda) yang menjamin keberlanjutan (*sustainability*) program tersebut.

Secara umum, terdapat beberapa program yang merupakan program turunan dari pusat (program nasional), program diseminasi atau program yang diadopsi dari daerah lain, serta program inovatif yang sifatnya developmentasi (peningkatan kualitas terobosan pada inovasi yang ada).

A. Kehidupan Ekonomi

1. Pertumbuhan Ekonomi



(Sumber : Monitoring dan Evaluasi FIPO : 2009-2010)

Pada pertumbuhan ekonomi, terdapat tiga isu strategis yang menonjol yakni pendapatan daerah dan masyarakat, suprastruktur dan infrastruktur, dan investasi. Total temuan program untuk pertumbuhan ekonomi sebanyak 22 program. Dari 22 program yang ditawarkan pemerintah kabupaten/kota tersebut, sebanyak 15 program yang mengusung isu strategis pendapatan daerah dan masyarakat, 5 program dengan isu strategis suprastruktur-infrastruktur, dan sisanya terdapat 2 program masuk dalam kelompok program dengan isu strategis investasi.

Empat program dari 22 temuan program merupakan program yang pernah diajukan pemerintah daerah pada tahun 2008 dan kini diajukan kembali dengan pertimbangan adanya kreativitas daerah untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik.

Isu strategis pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat terdapat pada program-program seperti pengembangan industri rokok, tembakau, rumput laut, pariwisata, sutera, pertanian, perusahaan daerah, dan peternakan. Sementara wujud program untuk isu strategis suprastruktur-infrastruktur lebih kepada upaya pemerintah daerah membangun dan mengembangkan kawasan industri, revitalisasi sarana dan prasarana pariwisata, serta penerbitan sistem pengaturan bagi petani pemakai air. Adapun program dengan isu strategis investasi cenderung pada penguatan investasi dalam bentuk kegiatan promosi potensi daerah dan menciptakan sistem yang akan memudahkan investor berinvestasi.

2. Pemerataan Ekonomi



(Sumber : Monitoring dan Evaluasi FIPO : 2009-2010)

Pada pemerataan ekonomi, terdapat 23 temuan program yang inovatif. Dari 23 temuan tersebut, 8 diantaranya merupakan program yang pernah diajukan tahun lalu. Sayangnya, program lama tersebut tidak semuanya mengalami pengembangbiakan program (proliferasi). Tidak terlihat perkembangan berarti pada program tersebut, bahkan, terdapat program yang mengalami penurunan kualitas.

Untuk parameter ini, akses modal sebagai isu strategis program merupakan yang terbanyak. Temuan FIPO menunjukkan, ada lima belas kabupaten/kota memiliki program dengan isu strategis akses modal. Program tersebut tersebar dalam berbagai bentuk kegiatan diantaranya, perkuatan modal usaha mikro, penciptaan 15.000 KUKM, dan simpan pinjam perempuan,

Selain itu, terdapat juga enam program temuan pemerataan ekonomi yang terkait dengan isu strategis sarana dan prasarana, mulai dari pemberian sertifikasi industri pengolahan, pupuk bersubsidi, hingga bantuan alat mesin pertanian (alsintan) kepada para petani.

Temuan program pada isu strategis distribusi pendapatan masyarakat dapat dilihat dari kegiatan penyadapan getah pinus yang terangkum dalam Gerbang Sedap (Gerakan Pengembangan Sejuta Sadap Pinus) dan Menggali Rupiah di Getah Pinus. Kedua program ini adalah program inovatif yang ditawarkan pemerintah daerah pada tahun kedua kegiatan penilaian FIPO.

3. Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan



(Sumber : Monitoring dan Evaluasi FIPO : 2009-2010)

Pada bagian ini, ada dua indikator yang terangkum menjadi satu yaitu pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Khusus untuk pemberdayaan ekonomi, terdapat 22 program yang berasal dari 3 isu strategis yang ditemukan FIPO pada kegiatan penelitiannya. Ketiga isu strategis adalah kapasitas ekonomi rakyat, pemberdayaan lembaga ekonomi lokal, serta potensi dan problem ekonomi lokal.

Terdapat enam program yang dikategorikan mengangkat isu strategis kapasitas ekonomi rakyat. Jenis kegiatannya antara lain penguatan armada tangkap masyarakat pesisir, pembinaan sutera alam, hingga Balai Benih Ikan (BBI).

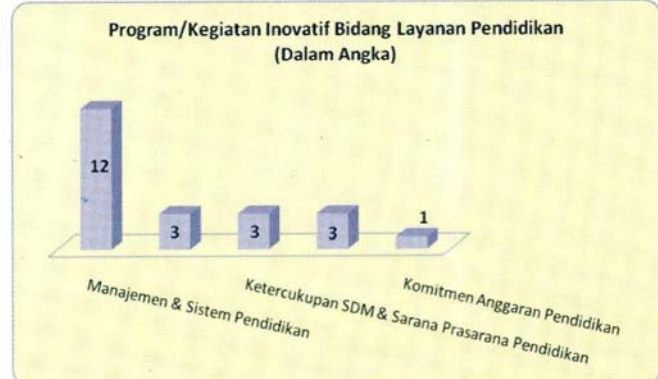
Untuk program dengan isu strategis pemberdayaan lembaga ekonomi lokal terdapat tiga program yang model kegiatannya berupa penguatan lembaga koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Sementara itu, untuk isu strategis potensi dan problem ekonomi lokal, FIPO menemukan enam program di mana jenis kegiatannya sangat variatif dari pemberdayaan peternak sapi potong, sarabba instant, 100 KUB perempuan, hingga IKM berbasis potensi lokal.

Upaya pemerintah daerah dalam mengentaskan kemiskinan yang diimplementasikan dalam program kerja juga cukup beragam. Ini terlihat dari tujuh program yang diidentifikasi FIPO sebagai program yang diarahkan untuk mengurangi angka kemiskinan sekaligus menjadi alat memberdayakan masyarakat kurang mampu berdasarkan potensi yang dimilikinya. Kegiatan-kegiatan yang terangkum dalam program ini antara lain CRASH program, gerbang taskin, BLM, dan pengentasan kemiskinan terpadu.

B. Layanan Publik

4. Pendidikan



(Sumber : Monitoring dan Evaluasi FIPO : 2009-2010)

FIPO menemukan 22 program bidang layanan pendidikan yang tersebar pada lima isu strategis. Ada 3 program pada isu strategis aksesibilitas (mudah, murah, terjangkau, dan merata), 3 program fokus pada isu ketercukupan SDM, 3 program pada isu strategis sarana prasarana pendidikan, 1 program yang mengangkat isu strategis komitmen anggaran pendidikan, 12 program menekankan pada isu manajemen dan sistem pendidikan, dan 3 program dengan isu strategis partisipasi penyelenggaraan pendidikan sebanyak.

Program pemerintah daerah yang mencakup aksesibilitas adalah pendidikan gratis dengan segala kebijakannya. Dalam pelaksanaan pendidikan gratis masing-masing daerah memiliki kekhasan yang membuat program pendidikan gratisnya berbeda dari daerah lainnya. Misalnya, ada daerah yang menggratiskan mulai dari TK sampai SMU dan ada pula daerah yang memberikan subsidi penuh khusus untuk siswa miskin mulai dari buku tulis, sepatu dan kebutuhan sekolah lainnya.

Ketercukupan sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana pendidikan diwujudkan pemerintah daerah melalui program-program seperti perpustakaan malam, penyediaan bus sekolah, hingga pembangunan USB.

Yang menarik, pada isu strategis manajemen dan sistem pendidikan, upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan mutu pendidikan ditempuh melalui pendirian sekolah khusus, sekolah unggulan (SMK ISO, SSN & RSBI), fit and proper test bagi kepala sekolah dan pengawas sekolah, serta Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).

5. Kesehatan



(Sumber : Monitoring dan Evaluasi FIPO : 2009-2010)

Pada layanan kesehatan, FIPO menemukan 22 program inovatif yang tersebar pada tiga isu strategis utama yakni ketercukupan SDM, sarana dan prasarana, partisipasi penyelenggaraan layanan kesehatan, dan sistem perlindungan kesehatan. Dari ketiga isu strategis di atas, partisipasi penyelenggaraan layanan kesehatan merupakan isu strategis yang paling banyak ditemukan pada program-program kesehatan pemerintah daerah.

Terdapat 10 program inovatif yang mengangkat isu partisipasi penyelenggaraan layanan kesehatan dengan berbagai ragam program kegiatan dari penguatan jamkesda, tim armada kesehatan gratis plus, puskesmas ISO, hingga survei mawas diri.

Untuk penguatan program jamkesda, misalnya, program asuransi kesehatan yang telah berjalan beberapa tahun ini terus berbenah meningkatkan mutu layanan melalui kebijakan jemput bola.

Sementara itu untuk isu strategis ketercukupan SDM, sarana dan prasarana terdapat pada delapan program inovatif. Untuk menambah tenaga perawat, salah satu kabupaten menyekolahkan siswa lulusan SMU yang berasal dari daerah terpencil dan dari keluarga miskin pada program Diploma-III Keperawatan. Program lainnya terkait ketercukupan sarana dan prasarana kesehatan adalah peningkatan fasilitas puskesmas, pustu, poskesdes minimalis, layanan kesehatan masyarakat, dan perbaikan layanan puskesmas.

Sistem perlindungan kesehatan masyarakat juga diimplementasikan dalam bentuk program kerja oleh empat kabupaten. Yang menarik, salah satu kabupaten menganggarkan biaya miliaran rupiah khusus untuk pengadaan susu gratis bagi ibu hamil. Selain itu salah satu kabupaten juga dalam beberapa tahun terakhir telah menetapkan beberapa desanya sebagai kawasan tanpa rokok (KTR). Sedangkan dua kabupaten lainnya membuat program yang mengarah pada penguatan desa siaga dan kemitraan bidan dan dukun.

6. Perizinan



(Sumber : Monitoring dan Evaluasi FIPO : 2009-2010)

Untuk indikator perizinan dan administrasi kependudukan, seluruh kabupaten/kota penelitian menawarkan program yang mereka anggap sebagai program inovatif sehingga total temuan program untuk indikator ini sebanyak 23 program. Meski demikian, dari 23 program tersebut hanya beberapa program yang dapat diapresiasi dan dianggap memenuhi kategori yang dipersyaratkan oleh FIPO.

Ada dua isu strategis untuk indikator ini yakni, pertama, aksesibilitas. Aksesibilitas terkait dengan proses perizinan yang murah, mudah, efektif, dan efisien. Sebagian besar program hasil temuan FIPO mengangkat isu strategis ini dengan berbagai jenis kegiatan/program seperti layanan KTP 10 menit, jemput bola gratis KTP-KK dan sweeping KTP, dan pelayanan administrasi kependudukan gratis.

Isu strategis kedua untuk indikator ini adalah jaminan keadilan dan sistem keadilan. Untuk isu ini FIPO menemukan 10 program, mulai dari program KTP berasuransi dan layanan jemput bola hingga layanan perizinan yang terintegrasi dalam satu kantor.

C. Performa Politik

7. Partisipasi Masyarakat dan Kesenambungan Politik



(Sumber : Monitoring dan Evaluasi FIPO : 2009-2010)

Dua isu strategis yang ditemukan dalam program pada indikator partisipasi publik dan kesinambungan politik lokal yakni manajemen konflik dan proses pembangunan. Isu strategis manajemen konflik dalam penelitian FIPO hanya terdapat pada satu program, yakni program Kewaspadaan Dini Masyarakat. Program ini merupakan program rutin

yang dilaksanakan oleh kantor Kesatuan Bangsa.

Isu strategis proses pembangunan terkait dengan program yang melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan baik saat perencanaan, implementasi, monitoring, dan/ atau evaluasi. FIPO menemukan 20 program yang menekankan isu strategis proses pembangunan. Secara umum, implementasi program dengan isu ini tertuju pada kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Namun demikian, meski tidak mengubah substansi dan tata laksana musrenbang, sejumlah kabupaten/kota memasukkan beberapa kebijakan tambahan. Misalnya, terdapat kabupaten/kota dengan kebijakan pelibatan Bappeda pada pra-musrenbang desa, kabupaten/kota yang mengikutsertakan anggota dewan dan LSM di musrenbang desa, kabupaten/kota yang mengadakan musrenbang khusus untuk perempuan, serta kabupaten/kota yang melibatkan anak pada musrenbang desa.

Selain pada musrenbang, partisipasi warga juga terlihat pada kegiatan gotong-royong dalam membangun desa seperti pembuatan jalan tani, jalan desa, jembatan, perpipaan air, embung, bahkan sampai pembangunan PLTMH.

Partisipasi masyarakat pada proses pembuatan kebijakan daerah dapat terlihat pada Regulatory Impact Assessment (RIA) di mana wakil-wakil masyarakat dapat menuangkan aspirasi mereka sebelum produk hukum diterbitkan menjadi perda. Dengan demikian perda yang terbit telah mewakili aspirasi masyarakat.

8. Akuntabilitas Publik



(Sumber : Monitoring dan Evaluasi FIPO : 2009-2010)

Dari seluruh indikator, akuntabilitas publik menjadi salah satu indikator yang memiliki program inovatif yang cukup beragam. Ada 21 temuan program yang tersebar pada lima isu strategis. Terdapat 5 program menyangkut isu strategis akses informasi, 7 program tentang pengaduan masyarakat, 7 program yang menekankan aspek transparansi, dan masing-masing 1 program terkait dengan isu strategis responsifitas/responsibilitas aparatur dan sanitari birokrasi.

Untuk akses informasi, masyarakat dapat mengakses informasi daerah mereka melalui radio, televisi lokal, koran,

internet, dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). Pada pengaduan masyarakat, pengaduan dilakukan melalui Metode Manual Praktis, SMS, Web Site dan Tudang Siptulung. Beberapa daerah bahkan membentuk Unit Pengaduan Masyarakat dan Komisi Transparansi dan Partisipasi (KTP).

Responsifitas dan responsibilitas aparatur dapat dilihat pada Workshop penerapan standar pelayanan minimum (SPM) yang diadakan Komisi Transparansi dan Partisipasi. Sedangkan untuk sanitari birokrasi, salah satu daerah menawarkan Pakta Integritas Kinerja. Beberapa daerah telah menerapkan pakta ini, namun nyatanya tidak semua daerah menganggap apa yang telah mereka lakukan sebagai inovasi sehingga tidak terungkap dalam penelitian.

Transparansi rupanya telah menjadi salah satu upaya penting pemerintah daerah untuk membangun good governance. Hasil riset FIPO menunjukkan ada tujuh kabupaten/kota memilih isu transparansi sebagai program inovatif mereka. Program inovatif yang terangkum dalam transparansi mencakup Unit Layanan Pelelangan (ULP), Tim Verifikasi Administrasi dan Fisik Pembangunan, Kalender APBD, e-Procurement, Jasa Publikasi Pelayanan Publik, dan Sistem Informasi melalui Layar Sentuh (touch screen).

D. Lingkungan Hidup



(Sumber : Monitoring dan Evaluasi FIPO : 2009-2010)

Masalah lingkungan hidup menjadi masalah krusial dan menjadi perhatian seluruh kabupaten/kota, tidak terkecuali kabupaten/kota yang baru terbentuk.

Bukti bahwa kabupaten/kota concern terhadap lingkungan hidup terlihat dari program-program kabupaten/kota yang mengarah pada kegiatan meminimalisir tingkat kerusakan lingkungan baik melalui integrasi pengelolaan lingkungan maupun menjaga kelestarian sumber daya alam.

Dalam penelitian FIPO, sebagian besar kabupaten/kota cenderung pada program menjaga kelestarian alam, seperti manajemen polusi, pengelolaan sampah ramah lingkungan, pengembangan energi alternatif, daur ulang material alam, buatan, dan energi, serta pelestarian hutan berbasis masyarakat, pegunungan, sungai, udara, dan material lainnya.



Jika dipilah berdasarkan indikatornya, terdapat 20 program lingkungan hidup yang fokus pada kelestarian sumber daya alam (sustainability natural capital). Selain itu, ada 2 program yang indikatornya tentang integrasi pengelolaan lingkungan.

Untuk parameter lingkungan hidup ini, program-program yang dijalankan kabupaten/kota juga mengangkat berbagai isu strategis. Pada isu manajemen polusi, kabupaten/kota berupaya meminimalkan polusi melalui pembangunan laboratorium pengendalian pencemaran lingkungan. Sedangkan isu pengelolaan sampah ramah lingkungan dilakukan dengan mengolah sampah menjadi biogas, pupuk cair dan padat di tingkat rumah tangga. Dengan demikian tidak semua sampah berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA). Bahkan salah satu kota sedang merancang alat penerang dari kegiatan pengolahan sampah.

Pada isu strategis pengembangan energi alternatif ramah lingkungan dan terbarukan, beberapa kabupaten telah berhasil menciptakan energi alternatif baik melalui pemanfaatan angin (Pembangkit Listrik Tenaga Bayu), air (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hydro dan Pico Hydro), dan tenaga matahari (Pembangkit Listrik Tenaga Surya). Hal yang menarik, salah satu kabupaten berhasil membangun sejumlah pembangkit listrik terbarukan/PLTMH yang mensuplai listrik ke rumah-rumah masyarakat yang masih sulit dijangkau layanan PLN. Bahkan, di kabupaten tersebut, jumlah rumah/kepala keluarga yang terlayani aliran listrik PLTMH lebih banyak dibandingkan jumlah rumah yang mendapatkan pasokan listrik PLN.

Pelestarian hutan, pegunungan, sungai, udara, dan material lainnya juga diimplementasikan kabupaten/kota dalam bentuk program kerja. Untuk menghindari terjadinya banjir dilakukan berbagai upaya seperti pembuatan sumur resapan, biopori, gerakan hijau kota, penanaman mangrove, dan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan.

GAMBARAN UMUM HASIL SURVEI PUBLIK DI SULAWESI SELATAN 2009/2010

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi the Fajar Institute of Pro Otonomi (FIPO) telah memasuki tahun kedua pada tahun 2009/2010 ini. Survei publik di 23 kabupaten/kota dilakukan oleh lembaga independen CV. *CIPTA HIRARCHY* yang menjadi mitra FIPO. Parameter yang digunakan tetap sama dengan tahun sebelumnya yaitu, kehidupan ekonomi, pelayanan publik, performa politik, dan pengelolaan lingkungan hidup yang tersebar pada sembilan indikator.

Sasaran responden dalam survei publik juga tetap sama yakni pada 10 kelompok. Ke-10 kelompok responden tersebut adalah organisasi kemasyarakatan (seperti NU, Muhammadiyah, dan lain-lain), LSM, organisasi profesi (guru/dosen, dokter, dan lain-lain), tokoh masyarakat (tokoh agama/ dewan pendidikan/komite sekolah, dan lain-lain), pedagang/investor/pengusaha/kontraktor (jasa dan dagang, pabrikaan, koperasi-UMKM dan lain-lain), petani/nelayan, DPRD/parpol, kelompok perempuan, masyarakat umum, siswa/pelajar/mahasiswa.

Jumlah program inovatif yang menjadi sasaran survei publik tahun 2009/2010 sebanyak 199 program. Dari total program tersebut, secara umum memperlihatkan bahwa hanya 70,31 persen program yang dinilai baik oleh masyarakat. Realisasi program di lapangan justru lebih rendah lagi yakni hanya sebesar 59,39 persen. Artinya hampir sebagian besar program tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Nah, bagaimana jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya? Apakah ada peningkatan atau justru penurunan?

Pada 2008/2009 lalu, secara umum program yang dianggap baik oleh masyarakat sebesar 76,25 persen dan realisasi program sebesar 50 persen. Jika hasil survei 2008/2009 dan 2009/2010 dibandingkan berarti ada penurunan dari 2008/2009 ke 2009/2010 terkait program yang dianggap baik oleh masyarakat yakni dari 76,25 persen ke 70,31 persen. Meski demikian, dari segi realisasi program, terjadi peningkatan antara 2008/2009 dan 2009/2010 yakni dari 50 persen menjadi 59,39 persen.

Peningkatan realisasi program adalah indikasi positif dan menunjukkan bahwa pemerintah daerah serius membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakatnya. Selain itu, peningkatan realisasi program menggambarkan niat baik pemerintah daerah memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Meski demikian, masih terdapat program yang belum terlaksana secara maksimal.

Di bawah ini tersaji hasil survei publik dalam bentuk grafik.



(Sumber : Hasil Survei Publik Cipta Hirarchy : 2009- 2010)



1. Kehidupan Ekonomi

Dalam parameter kehidupan ekonomi, upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya bisa menghasilkan program inovatif yang dapat mempercepat peningkatan kehidupan ekonomi daerah dan masyarakat.

Kendala paling fundamen, sebagaimana hasil temuan FIPO, adalah infrastruktur yang belum maksimal dalam menunjang peningkatan perekonomian daerah. Dari tiga indikator kehidupan ekonomi yaitu pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, serta pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan program-program yang dilaksanakan sudah cukup baik. Khusus pada pemerataan ekonomi, program yang ditemukan masih terfokus pada penguatan permodalan terutama dalam pengembangan usaha kecil dan menengah.

Jika membandingkan hasil survei publik antara tahun 2008/2009 dan 2009/2010 untuk parameter kehidupan ekonomi terlihat bahwa pada 2009/2010 ada penurunan persepsi masyarakat atas program yang dianggap baik. Pada 2008/2009 lalu, program yang baik sebesar 85 persen, dan 40 persen dari program tersebut yang implementasinya berjalan baik. Sedangkan pada 2009/2010, program yang baik menurut kacamata masyarakat sebesar hanya 67,06 persen meski untuk tingkat implementasi meningkat dibandingkan 2008/2009 yakni 55,87 persen.

2. Pelayanan Publik

Ada tiga indikator yang menjadi sasaran pelayanan publik, yaitu pendidikan, kesehatan, dan pelayanan administrasi kependudukan dan perizinan.

Pada layanan pendidikan, kabupaten/kota masih terfokus pada program pendidikan gratis dengan implementasi kegiatan dan kebijakan yang beragam. Penyelenggaraan program pendidikan gratis bertujuan membantu masyarakat miskin dan membuka peluang semua lapisan masyarakat untuk bisa mengenyam pendidikan secara layak.

Bidang layanan kesehatan juga masih menekankan pada program kesehatan gratis yang model penerapan programnya setiap kabupaten/kota saling berbeda. Dari penjelasan tujuan program kesehatan masing-masing kabupaten/kota, pelayanan kesehatan sedapat mungkin dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.

Pelaksanaan program pendidikan dan kesehatan gratis ini sudah berjalan dengan baik pada sejumlah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Sama halnya pada parameter kehidupan ekonomi, bidang pendidikan dan kesehatan pun dari sisi kuantitas menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya. Jika pada tahun 2008/2009, program yang baik menurut persepsi masyarakat sebesar 90 persen, namun pada tahun 2009/2010 turun menjadi 86,25 persen. Meski demikian, pada tingkat implementasi program menunjukkan peningkatan yakni dari 65 persen menjadi 75,22 persen.

Masalah dan kendala utama yang dihadapi pada pelaksanaan program pendidikan dan kesehatan di Sulawesi

Selatan sama dengan tahun sebelumnya yaitu masyarakat masih mengeluhkan persyaratan administrasi yang berbelit-belit dan kualitas pelayanan yang belum memadai.

Dari hasil survei, pada umumnya masyarakat menilai bahwa program pendidikan dan kesehatan gratis ini sangat membantu mengurangi beban mereka sehingga mereka sangat berharap agar program pendidikan dan kesehatan lebih ditingkatkan lagi.

Program layanan administrasi kependudukan yang dilakukan kabupaten/kota fokus pada perbaikan layanan untuk KTP, KK dan Akta Kelahiran. Sedangkan program perizinan terkait dengan pengurusan IMB, SIUP, TDP, ijin HO, dan bentuk perizinan lainnya.

Berdasarkan hasil survei terlihat bahwa terjadi peningkatan kualitas pelayanan administrasi masyarakat untuk mendapatkan kemudahan pengurusan administrasi kependudukan maupun pengurusan perizinan. Hasil survei 2008/2009 menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat hanya 35 persen sementara pada 2009 menjadi 59,46 persen.

Beberapa kabupaten/kota mengadakan layanan-layanan administrasi dan perizinan secara terpusat seperti SINTAP, KPT, layanan administrasi jemput bola, bahkan dengan sistem online. Sistem pelayanan yang terpusat ini sangat membantu masyarakat karena lebih efisien dan praktis. Masyarakat cukup mendatangi satu tempat untuk mendapatkan berbagai jenis layanan. Meski demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat sejumlah masalah. Salah satu masalah yang sering dikeluhkan masyarakat adalah seringnya suatu program diinformasikan gratis tetapi dalam praktiknya masih ada pungutan yang biasanya dilakukan para petugas.

3. Performa Politik

Pada performa politik ada dua indikator yang menjadi tolak ukur, pertama, partisipasi publik dan kesinambungan politik, dan yang kedua, akuntabilitas publik.

Secara kuantitas, program yang dianggap baik menurut masyarakat mengalami penurunan. Dari kurun waktu dua tahun (2008/2009 dan 2009/2010), survei jajak pendapat masyarakat menunjukkan pada tahun 2009/2010 program yang dianggap baik sebesar 60,19 persen. Jumlah program tersebut menurun hampir 10 persen dari program tahun 2008/2009 yang sebesar 70 persen.

Meski demikian, untuk realisasi program, terjadi peningkatan dari 40 persen pada 2008/2009 menjadi 49,65 persen pada 2009/2010.

Pada indikator partisipasi publik dan kesinambungan politik, program-program dengan tingkat keterlibatan masyarakat yang tinggi seperti dalam pembangunan pasar desa, jalan tani dan jembatan merupakan bukti bahwa partisipasi masyarakat merupakan komponen penting dalam pembangunan daerah. Kegiatan yang memediasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kabupaten/kota adalah musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).

Musrenbang sangat diapresiasi masyarakat karena dengannya aspirasi dari bawah mulai diperhatikan. Selain itu,

musrenbang menjadi jaminan bahwa program memiliki keberlanjutan dan secara kualitas akan lebih baik. Pada akhirnya, musrenbang akan mendorong masyarakat untuk memiliki tanggung jawab (sense of responsibility) dan berupaya agar program yang ada berjalan lebih baik.

Meski demikian, masih terdapat banyak keluhan dari masyarakat terkait rekomendasi yang dihasilkan dalam penjangkaran aspirasi di musrenbang. Keluhan tersebut terutama menyangkut realisasi hasil-hasil musrenbang yang tidak selalu sesuai dengan harapan masyarakat.

Sementara itu, program yang berhubungan dengan kesinambungan politik diwujudkan pemerintah kabupaten/kota melalui program penyuluhan atau seminar akan politik dan kesadaran hukum.

Program tersebut diperuntukkan bagi lembaga swadaya masyarakat (LSM), partai politik dan organisasi-organisasi kemasyarakatan.

Program pemerintah daerah dalam akuntabilitas publik pada umumnya memprogramkan sistem pengaduan masyarakat seperti short message service-SMS publik, website, unit pengaduan dan lain-lain. Juga terdapat kabupaten/kota yang memprogramkan sistem pelayanan pelelangan terbuka yang dikenal dengan e-procurement (tender berbasis internet). Hal ini sangat membantu masyarakat dalam mengakses dan memberikan informasi ke pemerintah maupun sebaliknya. Namun permasalahan utama yang kerap dikeluhkan masyarakat dalam pelaksanaan program ini, terutama unit-unit pengaduan, adalah realisasi program yang terlambat, bahkan terkadang pengaduan tidak mendapat respon.

4. Performa Lingkungan Hidup

Problema lingkungan hidup merupakan masalah yang mendapat perhatian penuh seluruh masyarakat dunia. Penilaian masyarakat untuk program-program yang terkait dengan parameter ini pada 2009/2010 menunjukkan, sebanyak 67,36 persen menganggap bahwa program lingkungan hidup yang dijalankan pemerintah kabupaten/kota adalah baik. Respon masyarakat tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Hasil penilaian masyarakat atas program lingkungan hidup pada 2008/2009 memperlihatkan bahwa 70 persen masyarakat/responden merasakan program pemerintah berlangsung baik.

Realisasi program juga menunjukkan pola hal yang sama yakni terjadi penurunan pada 2009/2010 jika dibandingkan 2008/2009. Jika pada 2008/2009 lalu program yang diimplementasikan mencapai 60 persen, maka pada tahun ini turun menjadi 56,74 persen. Data ini patut dicermati karena dikhawatirkan kabupaten/kota hanya rajin membuat program tetapi tidak serius merealisasikannya.

Pemanasan global menjadi salah satu topik penting para pemerhati lingkungan hidup sebagai akibat dari semakin tergerusnya ruang-ruang hijau dan produksi karbon

yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Karena itu, sebagian besar program lingkungan hidup kabupaten/kota diarahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan seperti program penghijauan dan perluasan ruang hijau. Program-program juga fokus pada upaya mengadakan sarana sumber energi alternatif seperti pembangunan energi terbarukan (PLTMH, PLTS, biogas) dan pengolahan sampah terpadu. Hanya saja, program ini belum menyentuh seluruh wilayah dalam satu kabupaten/kota tetapi pada wilayah-wilayah tertentu saja.

Masalah utama lingkungan hidup di kabupaten/kota yang mengemuka antara lain, pertama, pemantauan pemerintah daerah terhadap kualitas lingkungan secara kontinu masih kurang sehingga penurunan kualitas lingkungan baru terlihat setelah kondisinya sudah rusak. Kedua, komitmen pemerintah daerah dalam penegakan hukum bagi para perusak lingkungan masih sebatas wacana dan realisasinya belum maksimal.



OTONOMI AWARD 2010



The Fajar Institute of Pro Otonomi (FIPO) adalah lembaga independen yang melakukan monitoring terhadap pelaksanaan otonomi daerah di Sulawesi Selatan. Berdasarkan hasil monitoring tersebut, dibuat rating pelaksanaan otonomi award untuk setiap kabupaten dan kota. Lembaga ini didirikan sebagai bentuk kepedulian Harian Fajar terhadap pentingnya kemajuan daerah.

Otonomi Award adalah penghargaan yang diberikan FIPO kepada kabupaten dan kota yang mendapat rating tertinggi pada setiap indikator yang dijadikan alat monitoring otonomi daerah. Otonomi Award diberikan untuk pertama kalinya ditahun 2009. Program ini akan terus dilaksanakan setiap tahunnya di Sulawesi Selatan.